

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Trotoar atau lebih dikenal dengan pedestrian ialah lintasan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. Jalur ini umumnya terdapat di daerah perkotaan menggunakan intensitas pergerakan masyarakatnya tinggi. Jalur pedestrian terbagi 3 yaitu: trotoar, penyeberangan sebidang, serta tidak sebidang. di Indonesia pedestrian lebih dikenal trotoar yang tidak hanya untuk berjalan kaki, namun juga untuk wahana rekreasi yang menyehatkan. oleh karena itu, biasanya pedestrian dilengkapi juga menggunakan fasilitas-fasilitas yang memberi kemudahan ketenangan untuk pejalan kaki fungsi jalur pedestrian yang disesuaikan dengan perkembangan kota artinya sebagai fasilitas pejalan kaki, sebagai unsur keindahan kota, sebagai media hubungan sosial, sebagai sarana perlindungan kota dan sebagai tempat bersantai serta bermain sehingga aktifitas ekonomi, sosial dan lainnya semakin tinggi dan kesejahteraan warga juga semakin baik.

Upaya Kabupaten Ponorogo untuk peningkatan pembangunan kawasan wisata yang sedang berjalan sebagai bentuk penunjang kegiatan disektor pariwisata. Akses tadi telah kewajiban pemerintah kabupaten Ponorogo dalam menyediakan infrastruktur yang layak, aman dan nyaman bagi masyarakat. Ponorogo artinya kota yang sedang berkembang pesat, ditinjau dari penduduknya serta perekonomiannya. untuk mendukung aktivitas serta perkembangan ponorogo maka pemerintah ponorogo berusaha memberikan yang terbaik dalam bentuk infrastruktur fisik dan non fisik meliputi korelasi sosial,aktifitas perekonomian, dll. Kebutuhan akan infrastruktur fisik sangat esensial untuk menunjang kemudahan aksesibilitas kegiatan dan perkembangan di perkotaan. fasilitas pejalan kaki yang lebih baik bisa mendukung pengentasan kemiskinan sebab mempertinggi mobilitas dan aksesibilitas masyarakat miskin ke aneka macam pelayanan dasar serta peluang kerja. menaikkan gerak jalur pedestrian artinya salah satu prasarana.

infrastruktur fisik berupa jalan yang di peruntukan bagi aktifitas pejalan kaki. Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas jalan spesifik buat aktifitas berjalan kaki yang berupa jalur pedestrian, daerah penyeberangan, dan fasilitas lain. sebab Selain itu trotoar adalah bentuk berasal citra kota serta tata kota yang baik.

Perencanaan akan kebutuhan jalur pedestrian wajib di rencanakan dengan baik sesuai ketentuan dan standar aturan perencanaan jalur pedestrian dengan mempertimbangkan serta mengutamakan aspek keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki. kenyamanan jalur pedestrian wajib dijadikan prioritas pada perencanaan transportasi perkotaan. Pembangunan jalur pedestrian yang baik sesuai perencanaan jalur pejalan kaki di jalur umum akan meningkatkan ketenangan dan kuantitas pejalan kaki serta kualitas lingkungan perkotaan yang berdampak pada polusi udara dan konsumsi energy. Selain itu jalur pedestrian juga dapat meningkatkan Kesehatan bagi pejalan kaki dan kualitas perkotaan. Darmawan ( dalam muslihun ) berkata bahwa terdapat 3 unsur penting yang harus dijaga pada kondisi hubungan yang harmonis, seimbang dan lestari terhadap perencanaan suatu kawasan yaitu insan dengan segala aktifitasnya dengan lingkungan alam menjadi kawasan serta pemanfaatan jalur oleh manusia.

Selanjutnya darmawan berkata bahwa keharmonisan akan ada bilamana alam terjaga dengan baik dengan meminimalkan penggunaan kendaraan yang menggunakan bahan bakar yang tak ramah lingkungan. oleh sebab itu jalur pedestrian artinya upaya untuk meminimalisir polusi serta meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Lingkungan kota yang bersih dari polusi artinya kota yang ramah bagi pejalan kaki dengan memberikan fasilitas yang layak. pada perkembangannya pedestrian di sejumlah titik pada ponorogo di pengaruhi oleh beberapa factor diantaranya karena adanya kebijakan pemerintah mengenai tata ruang kota, dengan tujuan untuk membentuk kota ponorogo menjadi tertata dan indah .

Landasan aturan Pedestrian Kebijakan Pemerintah dalam merevitalisasi Jalur pedestrian pada jalan Jenderal Soedirman Kab.Ponorogo ialah Undang-

Undang nomor 26 Tahun 2007 perihal Penataan Ruang : Pasal 28 huruf c; Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Pasal 26, serta Pasal 27 berlaku mutatis mutandis buat perencanaan tata ruang daerah kota, dengan ketentuan selain rincian dalam Pasal 26 ayat (1) ditambahkan: c. planning penyediaan serta pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, serta ruang evakuasi bencana, yang diperlukan untuk menjalankan fungsi daerah kota sebagai sentra pelayanan sosial ekonomi serta pusat pertumbuhan wilayah.

1. Peraturan Menteri Pekerjaan umum angka 03/PRT/M/2014 perihal pedoman Perencanaan, Penyediaan dan Pemanfaatan Prasaran serta Saran Jaringan Pejalan Kaki di kawasan Perkotaan :

a. Pasal 3; Perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki dilakukan dengan memperhatikan:

- 2) fungsi dan manfaat prasarana serta sarana jaringan pejalan kaki
- dua) prinsip perencanaan prasarana serta sarana jaringan pejalan kaki
- 3) kriteria prasarana serta sarana jaringan pejalan kaki;
- 4) teknik perencanaan prasarana serta wahana jaringan pejalan kaki
- lima) ruang jalur pejalan kaki.

b. Pasal 4 ; Fungsi serta manfaat prasarana serta wahana jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 alfabet a yaitu buat memfasilitasi konvoi pejalan kaki dari satu daerah ke daerah lainnya dengan mengklaim aspek keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki.

c. Pasal 5 ; Prinsip perencanaan prasarana serta sarana jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal tiga huruf b menekankan di pertimbangan aspek kepekaan pejalan kaki serta aspek kontekstual daerah.

tiga. tata Pedestrian Jl. Jenderal Soedirman Kab.Ponorogo berbasis ekologi berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan hidup angka 16 Tahun 2012 perihal pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan hidup.

Revitalisasi pedestrian yang akan dilakukan pada sejumlah titik di ponorogo ialah perombakan sebagai jalan yang iconic, mirip jalan yang terdapat di Malioboro, Yogyakarta. Sebelumnya daerah tadi ialah jalanan



yang tiap sisi bahu jalan berdiri ruko-ruko perdagangan. Trotoar jalan raya dialih fungsikan sebagai tempat wisata yang ramai pengunjung. Jalan yang semula terdiri berasal 2 lajur, kini diubah menjadi jalan satu arah. Jalan raya yang semula lebar, mengalami penyempitan lahan jalan. Trotoar yang selama ini tak berfungsi, dialihkan fungsikan sebagai kawasan buat berwisata dengan disediakan tempat duduk yang nyaman.

dengan face off, pemerintah akan membangkitkan kembali Ponorogo yang karakternya luar biasa pemerintah akan bangkitkan ekonomi serta budaya. Pedestrian akan di mulai berasal titik Jl. Hos Cokroaminoto. Face off Jalan HOS Cokroaminoto ialah salah satu program pada 99 Hari Kerja Pertama pasangan Bupati serta Wakil Bupati Sugiri Sancoko-Lisdyarita pada mengawali tugasnya. Face off Jalan HOS Cokroaminoto dimulai berasal perempatan Pasar Legi ke selatan dan berakhir pada pertigaan Ngepos Ponorogo. Akan dilakukan pelebaran pedestrian masing-masing menggunakan lebar 2,5 meter. Jalan yang saat ini lebarnya 17 meter akan dikurangi sehingga menjadi 12 meter. terdapat juga penggantian sejumlah pohon, pemasangan sejumlah lampu, pemasangan bangku, pembuatan spot foto, sampai penyediaan area parkir. terdapat pula penataan arus Jalan Dr Soetomo yang rencananya diubah menjadi satu arah dari barat ke timur atau berlawanan dengan arus searah sebelumnya.

Dilanjutkan Revitalisasi di Jalan Sudirman Trotoar Jalan Jenderal Soedirman mempunyai ± 970 m. sebelum dilakukan revitalisasi kondisi rusak dan tak berfungsi secara optimal maka berasal itu perlu adanya pembangunan/pemeliharaan selain itu pedestrian akan berfungsi sebagaimana mestinya dimana fungsi jalur pedestrian yang disesuaikan menggunakan perkembangan kota artinya menjadi fasilitas pejalan kaki, menjadi unsur estetika kota, menjadi media hubungan sosial, menjadi wahana perlindungan kota dan menjadi kawasan bersantai dan bermain sebagai akibatnya aktifitas ekonomi, sosial serta lainnya semakin semakin tinggi dan kesejahteraan rakyat juga semakin baik.

Program Face Off Ponorogo akan berlanjut ke Jalan Urip Sumoharjo program face off Jalan Urip Sumoharjo Ponorogo dimulai menggunakan pembongkaran media jalan di tanggal 28 Maret 2022. Dilanjutkan dengan penebangan pohon pengayom sebab akan terdapat penambahan pelebaran trotoar sampai dua meter. tata pedestrian Jl. Urip Sumoharjo ditarget terselesaikan di bulan November 2022. Sebelumnya Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko pada pengenalan menyampaikan acara face off akan terus dilanjutkan, dimana terdapat segi empat emas Jalan HOS Cokroaminoto - Jalan Jenderal Soedirman - Jalan Diponegoro - Jalan Urip Sumoharjo. acara face off pedestrian yg dilaksanakan di beberapa titik di Ponorogo saat ini bertujuan tak hanya mempercantik wajah kota saja, namun juga akan jadi penumbuh ekonomi masyarakat Ponorogo sebab sebagai destinasi wisata kawasan kota.

#### **B. Rumusan persoalan**

berdasarkan Uraian Latar Belakang pada atas, maka bisa dirumuskan tentang konflik yang peneliti angkat dalam skripsi ini merupakan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Kab.Ponorogo pada Revitalisasi Jalan Jenderal Soedirman Kab.Ponorogo?
2. Bagaimana Proses pelaksanaan Revitalisasi Jalan Jenderal Soedirman Kab.Ponorogo ?

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan yang ingin peneliti lakukan adalah selain untuk menambah pengetahuan dan pemahaman peneliti mengenai upaya pemerintah dalam pembangunan jalur pedestrian Jl.Jenderal Sudirman di ponorogo selain itu peneiliti ingin mengetahui beberapa aspek yaitu :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Kebijakan Pemerintah Kab.Ponorogo dalam Merevitalisasi Jalan Jenderal Soedirman Kab.Ponorogo
2. Untuk mengetahui Bagaimana Proses Pelaksanaan Revitalisasi Jalan Jenderal Soedirman Kab.Ponorogo

## **C. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun secara praktis.

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi yang baik secara ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan revitalisasi jalur pedestrian jalan jenderal sudirman kabupaten ponorogo

### **2. Manfaat Praktis**

Secara Praktis, tulisan penelitian ini dijadikan sebagai bahan ilmiah untuk referensi dan sebagai bahan penunjang untuk kebutuhan lingkungan kampus khususnya program studi ilmu pemerintahan.

## **D. Penegasan Istilah**

Untuk mempermudah memahami konsep dalam penelitian ini akan di jelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

### **1. Kebijakan**

Kebijakan pemerintah merupakan ialah kebijakan yang ditujukan untuk publik pada pengertian yang seluas-luasnya (negara, rakyat dalam berbagai status dan untuk kepentingan umum ), baik itu



dilakukan secara eksklusif maupun tak secara eksklusif yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik.

## 2. Revitalisasi

suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan pulang suatu hal yang sebelumnya terberdaya sehingga revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan untuk menjadi penting, sedangkan istilah vital memiliki arti sangat krusial atau sangat diharapkan sekali untuk kehidupan dan sebagainya.

## 2. Jalur Pedestrian

Jalur pedestrian atau trotoar ialah kawasan jalan spesifik bagi pejalan kaki. Infrastruktur yang satu ini menjadi salah satu fasilitas yang sangat krusial bagi warga yang didesain sebagai bentuk pemenuhan hak bagi para pejalan kaki yang melintas pada area yang seringkali dilalui berbagai kendaraan bermotor. Carl dan Rubenstein (2012) menerangkan bahwa sidewalk atau pedestrian sisi jalan ialah ruang publik yang dilewati orang dengan berjalan kaki yang tersusun antara jalan satu dengan jalan lain yang terhubung, terletak pada sisi kiri dan kanan jalan.

## E. Landasan Teori

### 1. Kebijakan Publik

Kebijakan pemerintah artinya hasil hubungan intensif antara para actor pembuat kebijakan di fenomena yang wajib dicarikan solusi berdasarkan pendapat subarsono kebijakan pemerintah bisa berupa undang-undang peraturan pemerintah, peraturan provinsi, peraturan pemkot/kabupaten, serta keputusan walikota/bupati. Selain itu partisipasi rakyat diikutsertakan supaya bisa menghasilkan keputusan yang terbaik. Pengertian tadi diperkuat oleh Tomas R.D.ye pada Dunn mempunyai 3 elemen dalam pembentukannya yaitu kebijakan public pelaku kebijakan serta lingkungan kebijakan ketiga elemen ini saling mempunyai andil serta saling mempengaruhi sebagai contoh, pelaku kebijakan bisa memiliki andil pada kebijakan, tetapi mereka juga bisa pula dipengaruhi oleh

keputusan pemerintah. Lingkungan kebijakan juga mempengaruhi oleh pembuat kebijakan serta kebijakan itu sendiri. Pengambilan keputusan untuk sebuah kebijakan tak semata hanya melihat di ketiga elemen itu saja. tetapi juga ditentukan terhadap tahap-tahap pembuatannya. berdasarkan dunn tahap pembuatan kebijakan terbagi sebagai lima tahap : penyusunan rencana, formulasi kebijakan, adopsi / legitimasi kebijaka, implementasi kebijakan, evaluasi / penilaian kebijakan. tahap – tahap perumusan kebijakan menurut William Dunn :

a. Penyusunan agenda/agenda setting

Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan perlu adanya penyusunan rencana dengan memasukan serta menentukan persoalan-persoalan atau isu-isu mana saja yang akan dijadikan prioritas buat dibahas kemudian dikumpulkan sebanyak mungkin buat diseleksi. Kriteria konflik yang mampu dijadikan rencana kebijakan public diantara : sudah mencapai kritis tertentu yang jika diabaikan menjadi ancaman yang serius, sudah mencapai taraf partikularitas tertentu yang berdampak dramatis, menyangkut emosi tertentu berasal sudut kepentingan orang banyak, menerima dukungan media massa menjangkau akibat yang amat luas, mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan pada rakyat dan menyangkut yang fasionable

b. Formulasi kebijakan

Formulasi kebijakan mampu dianggap juga dengan perumusan kebijakan yang artinya tahap awal pembuatan kebijakan. persoalan yang telah masuk pada rencana kebijakan selanjutnya dibahas oleh para pembuat kebijakan lalu dikelompokkan untuk mencari hasil pemecahan persoalan yang ada. Pemecahan persoalan tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. tetapi, perumusan kebijakan tak selalu membentuk peraturan atau perintah eksekutif juga hukum administrasi yang diusulkan. menetapkan suatu kebijakan diantara beberapa pilihan ialah proses untuk menetapkan kebijakan publik yang terbaik dan dalam hal



inihal sebenarnya inti pada proses formulasi kebijakan publik. Dalam formulasi kebijakan perlu diperhatikannya aspek-aspek yang melingkupi prosesnya seperti aspek publik, aspek teknokrtis, serta aspek politis

c. Adopsi/Legitimasi kebijakan

Adopsi/legitimasi kebijakan ialah langkah lanjut sesudah formulasi kebijakan yang bertujuan untuk menyampaikan otorisasi atau kekuasaan di proses dasar pemerintah. Bila tindakan legitimasi pada suatu rakyat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. tetapi warga negara wajib percaya bahwa tindakan pemerintah ialah sah. Proses legitimasi kebijakan membutuhkan sepenuhnya kepercayaan buat memilih kebijakan seperti apa yang lalu akan di sah kan oleh pemerintah. Ini adalah tahap akhir berasal sebuah keputusan pemilihan kebijakan lalu secara absolut di ambil kepastian dan penetapan kebijakan.

d. Implementasi kebijakan

Berhasil tidaknya suatu kebijakan pada akhirnya dipengaruhi pada tataran implementasinya. Secara sederhana implementasi kebijakan adalah tindakan pada proses verifikasi dari sebuah kebijakan. buat menganalisis proses implementasi kebijakan dilakukannya beberapa pendekatan salah satunya artinya top-down. Pendekatan tadi bertitik-tolak berasal perspektif bahwa keputusan-keputusan atau kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pihakpihak pembuat kebijakan wajib dilaksanakan oleh semua aparatur, administratur, atau birokrat di semua strata yang terutama di strata bawah. penekanan analisis di pendekatan ini ada di persoalan-persoalan pencapaian tujuan formal kebijakan yang sudah ditentukan. Evaluasi Kebijakan Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Pelaksanaan evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian,

evaluasi kebijakan mampu mencakup tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, acara-acara yang diusulkan buat menuntaskan persoalan kebijakan, implementasi, juga tahap akibat kebijakan. pelaksanaan evaluasi kebijakan intinya wajib memperhatikan 3 hal yang menjadi utama yaitu : 1) penilaian kebijakan berusaha buat memberi isu yang valid perihal kinerja kebijakan, 2) penilaian kebijakan berusaha buat menilai kepantasan tujuan atau sasaran dengan persoalan yang dihadapi, 3) penilaian kebijakan berusaha juga buat memberi sumbangan pada kebijakan lain terutama dari segi metodologi

pada konteks kebijakan pemanfaatan ruang melalui revitalisasi, Pemerintah Daerah Ponorogo mempunyai tujuan buat menaikkan pendapatam rakyat menjadikan destinasi wisata di Kota Ponorogo pada hal ini revitalisasi trotoar dilakukan sebab untuk memvitalkan kembali pedestrian di jalan jenderal sudirman yang sebelumnya tak berfungsi secara optimal. untuk kebijakan alih fungsi lahan serta revitalisasi trotoar di Kota Ponorogo ini telah di rancang programnya Dari tahun 2020, tetapi pelaksanaan program revitalisasi tersebut baru terealisasi pada tahun 2021-2023. Penyampaian ide dan gagasan terkait revitalisasi trotoar pada rakyat yang di awal mulanya menerima penolakan sebab kesalah pahaman perihal kebijakan pemerintah tadi ialah penyebabnya.

tetapi sesuai dengan tahap-tahap kebijakan yang pada dalamnya ada point implementasi, Pemerintah Daerah ponorogo melalui instasi yang terkait melakukan penanganan dini yaitu pengenalan pada rakyat perihal pelaksanaan kebijakan revitaliasasi trotoar dengn tujuan memberi penerangan dan pemahaman akan pentingnya revitalisasi trotoar bagi kelangsungan ekologi serta kemajuan kota ponorogo tetapi di pelaksanaannya tak Mengganggu lingkungan sekitar yang terdapat di dasar tanah atau lokasi yang akan direvitalisasi

## 2. Revitalisasi Kawasan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan umum No. 03/PRT/M/2014 perihal panduan Perencanaan, Penyediaan serta Pemanfaatan Prasarana dan Saran Jaringan Pejalan Kaki pada tempat Perkotaan : Pasal tiga perencanaan prasarana serta sarana jaringan pejalan kaki dilakukan menggunakan memperhatikan :

- a. Fungsi serta manfaat prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki
- b. Prinsip perencanaan prasarana serta sarana pejalan kaki
- c. Kriteria prasarana serta sarana jaringan pejalan kaki
- d. Teknik perencanaan prasarana serta sarana jaringan pejalan kaki
- e. Ruang jalur pejalan kaki

Pasal 4 : Fungsi dan manfaat prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki sebagai mana dimaksud dalam pasal 3 huruf a yaitu untuk memfasilitasi pergerakan pejalan kaki dari satu tempat ke tempat lainya dengan menjamin aspek keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki.

Pasal 5 : Prinsip perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b menekankan pada pertimbangan aspek kepekaan pejalan kaki serta aspek konstektual tempat. Revitalisasi kawasan adalah upaya untuk menghidupkan kembali daerah mati, yang di masa silam pernah hidup, atau mengendalikan dan mengembangkan kawasan untuk menemukan kembali potensi yang dimiliki atau pernah dimiliki atau yang seharusnya dimiliki oleh sebuah kota sehingga dibutuhkan bisa memberikan peningkatan kualitas lingkungan kota yang di akhirnya berdampak di kualitas hidup dari penghuninya. Revitalisasi kawasan pedestrian di jalan jenderal sudirman ialah upaya untuk menghidupkan kembali tempat pedestrian perkotaan yang dulunya pernah hidup atau mengendalikan, serta mengembangkan tempat ini untuk

menemukan kembali potensi yang dimiliki atau pernah dimiliki atau seharusnya dimiliki oleh kawasan ini baik dari segi ekonomi dan sosial budaya sebagai akibatnya diperlukan bisa memberikan peningkatan kualitas lingkungan kota yang di akhirnya berdampak di kualitas hidup berasal



warga. Untuk itu, revitalisasi bisa dikatakan menjadi salah satu pendekatan pada menaikkan vitalitas suatu kawasan Kota yang bisa berupa:

- a. Penataan kembali pemanfaatan lahan dan bangunan
- b. Renovasi kawasan juga bangunan-bangunan yang ada, sehingga bisa ditingkatkan dan dikembangkan nilai ekonomis dan sosialnya
- c. Rehabilitasi kualitas lingkungan hidup
- d. Peningkatan intensitas pemanfaatan lahan serta bangunannya

Keberhasilan pendekatan Revitalisasi di suatu kawasan dipengaruhi oleh aspek sosial dan karakteristik kawasan yang merupakan image atau ilustrasi suatu kawasan, bukan di ide atau konsep yang diterapkan tanpa penyesuaian dengan lingkungan wilayah tersebut. Pendekatan Revitalisasi sinkron taraf, sifat serta skala perubahan yang terjadi pada di tempat mampu dilakukan menggunakan Preservasi/ perlindungan, Rehabilitasi serta pembangunan balik . Revitalisasi daerah diarahkan untuk memberdayakan daerah pada usaha menghidupkan kembali aktivitas perkotaan/perdesaan serta vitalitas daerah buat mewujudkan daerah layak huni (Livable), mempunyai daya saing pertumbuhan serta stabilitas ekonomi lokal, berkeadilan sosial, berwawasan budaya dan terintegrasi di kesatuan sistem kota/desa. Revitalisasi pada prinsipnya tak hanya menyangkut masalah proteksi bangunan dan ruang kawasan bersejarah saja, tetapi lebih pada upaya untuk mengembalikan atau menghidupkan kembali wilayah di konteks Kota yang tak berfungsi atau menurun fungsinya agar berfungsi kembali, atau menata serta mengembangkan lebih lanjut wilayah yang berkembang sangat pesat tetapi kondisinya cenderung tak terkendali.

- a. intervensi Fisik, intervensi fisik mengawali aktivitas fisik revitalisasi serta dilakukan secara sedikit demi sedikit, mencakup pemugaran serta peningkatan kualitas dan syarat fisik bangunan, tata hijau, sistem penghubung, sistem pertanda/reklame dan ruang terbuka kawasan

- b. Rehabilitasi Ekonomi, Revitalisasi yang diawali dengan proses peremajaan artefak urban harus mendukung proses rehabilitasi aktifitas ekonomi
- c. Revitalisasi Sosial/Institusional, keberhasilan Revitalisasi sebuah kawasan akan terukur bila mampu menciptakan lingkungan yang menarik, jadi bukan beautiful place

Tujuan dan target Revitalisasi daerah artinya meningkatkan vitalitas daerah terbangun melalui intervensi perkotaan yg bisa membentuk pertumbuhan serta stabilitas ekonomi lokal, terintegrasi menggunakan sistem kota, layak huni, berkeadilan sosial, berwawasan budaya dan lingkungan, target Revitalisasi kawasan, meningkatnya stabilitas ekonomi kawasan melalui intervensi untuk: meningkatkan aktivitas yang bisa berbagi penciptaan lapangan kerja, Peningkatan jumlah perjuangan dan variasi usaha serta produktivitas tempat, Menstimulasi faktor-faktor yg mendorong peningkatan produktivitas kawasan, Mengurangi jumlah kapital bergerak keluar kawasan serta meningkatkan investasi yang masuk ke dalam kawasan.

3. Pendekatan, Kebijakan dan seni manajemen Revitalisasi kawasan menggunakan mempertimbangkan Tujuan serta target Revitalisasi tempat, maka dirumuskan pendekatan, kebijakan, serta taktik Revitalisasi daerah sebagai berikut:
  - a. Pendekatan  
Aktivitas Revitalisasi daerah memiliki beberapa azas pembangunan sebagai acuan dasar pada pelaksanaan. Azas-azas tersebut ialah: Berkeadilan, Keberlanjutan, Keberdayaan warga Lokal, Kebersamaan dan Kemitraan, Keserasian, Keselarasan serta ekuilibrium.
  - b. Kebijakan dan strategi Revitalisasi kawasan disusun mengacu di Kebijakan serta strategi Perencanaan Ruang dan daerah. Selanjutnya pemda harus menyusun Kebijakan dan strategi wilayah mengenai

Revitalisasi kawasan yang mengacu di Kebijakan serta strategi Nasional tersebut.

Kebijakan 1: Revitalisasi kawasan dilakukan di kawasan-kawasan strategis/potensial yang menurun produktivitas ekonominya serta terdegradasi lingkungan fisiknya.

Strategi: daerah yang di Revitalisasi diarahkan pada : a. daerah yang menurun produktivitas ekonominya, terjadi degradasi lingkungan dan /atau penurunan kerusakan.

Kebijakan 2: Peningkatan kualitas Perencanaan Ruang dan daerah yg mampu memberdayakan kegiatan Ekonomi, Sosial serta Budaya tempat strategi: membentuk kualitas lingkungan yang kreatif serta inovatif buat mendorong pertumbuhan ekonomi, menaikkan aksesibilitas, keterkaitan dan fasilitas kawasan untuk mengintegrasikan kawasan menggunakan sistem kota, memenuhi standar minimal pelayanan prasarana wahana kawasan, melestarikan tipe ruang dan bentuk bangunan yang signifikan secara kultural dan sejarah.

#### 4. Jalur Pedestrian

##### a. Pengertian Jalur pedestrian

Jalur pedestrian atau yang Bahasa Inggris yaitu pedestrian way berasal dari istilah pedos Bahasa Yunani yang berarti kaki serta way pada Bahasa Inggris yang berarti jalan. sehingga jalur pedestrian bisa diartikan menjadi jalur pejalan kaki. Jalur pedestrian juga diartikan sebagai pergerakan atau aliran atau perpindahan orang atau manusia dari satu kawasan ke titik asal (origin) ke daerah lain sebagai tujuan (destination) dengan berjalan kaki (Rubenstein dalam Rahmiati) jalur pejalan kaki/jalur pedestrian artinya wilayah yang menarik buat pekerjaan sosial, perkembangan jiwa serta spiritual, contohnya untuk bernostalgia, pertemuan mendadak, berekreasi, bertegur sapa dan sebagainya. Jadi jalur pedestrian ialah kawasan atau jalur spesifik bagi orang berjalan kaki. Jalur pedestrian di saat sekarang bisa berupa jalur pedestrian, pavement, sidewalk, pathway, plaza serta mall.



Jalur pedestrian di ruang kota, contohnya dikawasan perdagangan pada sebelah kanan serta kiri jalur pedestrian dan ada deretan toko serta di ujung jalur tersebut terdapat penguatan berupa plaza terbuka dan adalah lintasan untuk umum (Rubenstein pada rahmiati). dari shirvanni, bahwa jalur pedestrian wajib pada pertimbangankan sebagai salah satu elemen perencanaan kota. Sistem pedestrian yang baik bagi kota khususnya daerah perdagangan dapat memberi dampak yang baik dan merangsang aktifitas perdagangan. Mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan dan meningkatkan kaulitas lingkungan serta udara, sebab berkurangnya polusi kendaraan. buat menerima jalur pedestrian yang baik, jalur pedestrian wajib memiliki beberapa kriteria krusial, yaitu keamanan, menyenangkan, ketenangan dan daya Tarik.

#### **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional ialah uraian yang mengungkapkan perihal instrumen-instrumen berasal variabel yg akan dibahas yang bisa diamati atau diukur secara cermat dalam suatu objek atau kenyataan yang akan dibahas. Instrumen yang bisa diukur serta diamati tersebut merupakan bagian asal definisi operasional. bisa diukur serta diamati merupakan objek memungkinkan peneliti buat melakukan observasi atau pengukuran secara cermat tentang kenyataan. oleh sebab itu variabel dalam penelitian merupakan keberhasilan. Indicator pada penelitian Kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam Merevitalisasi Jalur Pedestrian Jalan Jenderal Soedirman Kab.Ponorogo yaitu Bagaimana Kebijakan Pemerintah Kab.Ponorogo pada Merevitalisasi Jalan Jenderal Soedirman serta Bagaimana Proses aplikasi Revitalisasi Jalan Jenderal Soedirman Kab.Ponorogo.

## **G. Metode Penelitian**

### **1.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini memakai metode penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti melakukan pengamatan secara eksklusif kepada pelaku responden baik pengamatan yang dilakukan pada tempat kerja Dinas PUPKP Kab.Ponorogo dan mewawancarai langsung dengan, kepala Dinas, kepala Bidang serta para staf bidang kawasan permukiman di Dinas PUPKP Kab.Ponorogo juga pengamatan pada akun-akun media sosial serta pula website yang dikelola sang petugas serta warga umum, dengan demikian peneliti bisa merincikan dan mengerti data yang diperoleh.

naratif merupakan metode untuk menelaah keadaan saat ini dari sekelompok orang, benda, rangkaian kondisi, sistem pemikiran atau kelas peristiwa. Tujuan asal penelitian deskriptif ini adalah buat mengungkapkan atau menggambarkan secara sistematis, factual atau seksama tentang informasi, karakteristik dan korelasi insiden yang diamati (Nazir,2017). Sedangkan kualitatif adalah menjadi penelitian yang bertujuan memahami kenyataan yang di alami subjek penelitian, motivasi, persepsi, Tindakan dan lain-lain secara holistic dengan cara menggambarkan pada bentuk istilah-istilah secara alamiah serta memanfaatkan metode alamiah (Moleong, 2017)

### **1.2. Teknik Penentuan Lokasi**

Lokasi penelitian ini pada laksanakan di kantor Dinas PUPKP Jalan Letjend Suprpto No.16 Kab.Ponorogo. Jika pada lihat kantor dpupkp mempunyai jaringan proyek-proyek yang sangat luas pada semua kab.ponorogo pada hal penyampaian berita pada public baik dari akun sosial media serta website juga sangat update sehingga diharapkan dapat digali informasi lebih mendalam serta falid tentang konteks upaya pemerintah dalam merevitalisasi pedestrian yang terdapat di jalan jenderal soedirman kab.ponorogo.

### **1.3. Teknik Penentuan Informan**

Penentuan informan yang dimaksud merupakan orang yang bisa menyampaikan informasi tentang informasi yang terjadi perihal konteks upaya pemerintah dalam merevitalisasi pedestrian dan saluran drainase perkotaan yang terdapat pada jalan jenderal soedirman kab.ponorogo. Metode yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu purposive sampling yang merupakan teknik penentu informan data dengan pertimbangan serta tujuan eksklusif berupa pemilihan sumber data atau siapa yang dianggap paling mengetahui perihal apa yang dibutuhkan. Informan yang dipilih oleh peneliti ialah kepala bidang serta kepala seksi staf Dinas PUPKP Kab.Ponorogo sejumlah 6 orang.

### **1.4. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data utama ialah asal data yang menyampaikan data langsung pada pengumpul data (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan RdanD, 2017). menggunakan istilah lain data peneliti dari langsung dari Sumbernya. Peneliti memakai hasil wawancara responden sebagai data primer. sumber informasi primer pada penelitian ini yaitu pihak berasal kantor DPUPKP Ponorogo.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah asal data yang di peroleh peneliti menggunakan cara tak langsung dan dijadikan menjadi pendukung data utama. dengan istilah lain data diperoleh contohnya buku-buku, jurnal serta laporan-laporan yang berkaitan dengan persoalan penelitian ini, sehingga data bisa diperoleh dengan cepat (Sugiyono, metode penelitian Kuantitatif kualitatif serta R&D, 2017). Data sekunder yang saya pakai yaitu berupa jurnal-jurnal, buku, e-book serta website kantor Dinas PUPKP.



## 1.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah usaha untuk mengumpulkan bahan-bahan yang berafiliasi dengan penelitian yang dapat berupa data, informasi, tanda-tanda, maupun berita yang sifatnya valid (sebenarnya), reliable (bisa dipercaya), serta objektif (sinkron dengan fenomena). Pada hal pengumpulan data ini, penulis terjun langsung di objek penelitian buat menerima data yang valid, maka peneliti memakai metode sebagai berikut

### a. Metode Wawancara

Metode wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk mengidentifikasi persoalan yang perlu diselidiki dan sikap serta kepentingannya. Teknik ini bisa dipergunakan untuk menerima data yang seksama pada penelitian. Dengan arti wawancara ialah salah satu teknik pengumpulan data yang diberikan secara verbal pada responden yang bisa menyampaikan informasi terkait yang diteliti. Wawancara pada penelitian ini yaitu pada kepala Seksi serta Staf DPUPKP Kab. Ponorogo.

### b. Metode Observasi

Metode Observasi ialah Teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik jika dibandingkan memakai Teknik yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti mampu belajar tentang makna asal sikap tersebut. Observasi pada penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan pribadi di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya terkait analisis penerapan keterbukaan berita pada publik di kantor Dinas PUPKP Kab. Ponorogo.

### c. Metode Dokumentasi

Menurut (Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, 2015) Dokumentasi ialah suatu cara untuk memperoleh data serta informasi berupa buku, dokumen, angka tertulis, file, dan foto berupa informasi serta laporan. Dokumen dipergunakan untuk mengumpulkan dan meninjau data.

Dokumentasi pada penelitian ini yaitu melalui jurnal-jurnal, buku, e-book, dan website kantor DPUPKP Kab.Ponorogo

## 1.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data artinya proses penyuntingan data secara sistematis dari pengambilan data, wawancara, catatan lapangan, menguraikannya pada satu-satuan, mengklasifikasikan data, mensintesiskannya, menentukan mana yang krusial dan yang akan dipelajari serta juga memahami dan menarik konklusi supaya bisa dengan praktis di fahami (Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 2010). Teknik analisis data pada penelitian ini ialah analisis data induktif. Analisis data induktif artinya menarik kesimpulan yang berangkat asal fakta-fakta spesifik, untuk lalu di tarik kesimpulannya. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data pada penelitian ini ialah: Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, memahami Penelitian Kualitatif, 2012), Teknik pengumpulan data artinya langkah yang paling strategis serta krusial pada penelitian, sebab tujuan primer penelitian adalah mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data sudah dipergunakan untuk mengumpulkan data berdasarkan mekanisme penelitian untuk menerima data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah memakai teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi.

### 1. Condensasi Data

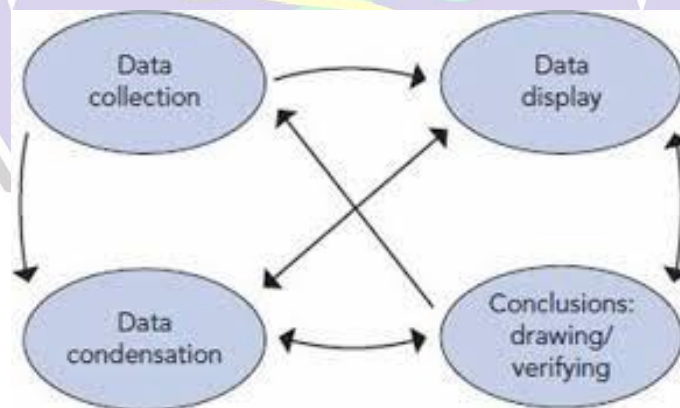
Condensasi Data mengacu di proses-proses pemilihan atau seleksi, focus, menyederhanakan dan melakukan pergantian data yang ada pada catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen juga data realitas yang sudah dihasilkan. Data kualitatif tersebut bisa diubah menggunakan cara seleksi, kompendium, atau urian memakai istilah-istilah sendiri dan lain-lain. sesuai data yang dimiliki, peneliti akan mencari data, tema, dan pola mana yang krusial, sedangkan data yang disebut tidak krusial yang akan dibuang. di penelitian kali ini pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara serta observasi langsung di kantor Dinas PUPKP Kab.Ponorogo mengenai

Proses dan Dampak Kebijakan Pemerintah dalam Merevitalisasi Jalan Jenderal Sudirman Ponorogo.

## 2. Display Data

menurut Miles dan Huberman yang dikutip Sugiyono pada (Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 2013) umumnya yang dipergunakan untuk menyajikan data pada penelitian kualitatif yaitu menggunakan teks dan deskriptif serta pada termin ini peneliti menyajikan data-data yang sudah direduksi ke dalam laporan secara sistematis. Data disajikan pada bentuk narasi dengan judul Kebijakan Pemerintah dalam Merevitalisasi Pedestrian di Jalan Jenderal Sudirman Pengambilan konklusi

Konklusi pada penelitian kualitatif mungkin mampu menjawab rumusan persoalan yang dirumuskan semenjak awal namun mungkin juga tidak, sebab rumusan masalah pada penelitian kualitatif masih bersifat ad interim serta akan berkembang sesudah penelitian di lapangan. Langkah selanjutnya yaitu menarik konklusi secara kritis dengan memakai metode induktif yang berangkat dari hal-hal yang bersifat spesifik. konklusi tadi lalu diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi serta display data sehingga konklusi yang diambil tak menyimpang dari konflik peneliti



Gambar 1.1 Sumber: Miles, M.B., and Huberman, A.M (2014)



### 3. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data pada penelitian kualitatif mencakup uji credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), serta confirmability (obyektivitas). sehingga, peneliti memakai credibility dengan triangulasi dengan pengujian validasi data pada penelitian ini. Sugiyono (2015) triangulasi ialah pengecekan data dari berbagai sumber menggunakan berbagai cara dan berbagai waktu. Secara holistik ada 3 triangulasi yaitu triangulasi metode, triangulasi sumber data serta triangulasi teori.

Dari ketiga bentuk triangulasi tersebut penelitian ini menerapkan bentuk triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data dilakukan menggunakan wawancara, observasi, serta dokumen. Triangulasi asal data yaitu menggali kebenaran info eksklusif dengan memakai berbagai sumber data seperti dokumen, file, hasil, wawancara, hasil observasi. pada proses ini peneliti melakukan pengumpulan data secara terus menerus sehingga tidak terjadinya disparitas informasi pada proses pengumpulan data dari Sumbernya. menjadi bahan pertimbangan serta penguat sumber data dalam penelitian ini maka peneliti mengambil penguat dari kantor Dinas PUPKP Kab.Ponorogo. Dimana data yang sudah diperoleh akan dicocokkan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi yang dilakukan pada waktu proses pengumpulan data berlangsung